



IMPLEMENTASI GELAR KEKUATAN KOARMADA II DI ALKI II TERHADAP STABILITAS KEAMANAN IKN

Slamet Nurdihanto

¹Universitas Pertahanan Republik Indonesia,
nurdihantos@gmail.com

Abstract. *Indonesia, as the largest archipelagic country, faces major challenges in maintaining security stability, especially with the relocation of the National Capital (IKN) to East Kalimantan. ALKI II, a strategic sea route connecting the IKN with other regions, is vulnerable to various security threats, both traditional and non-traditional. This study aims to analyze the implementation of the Koarmada II force deployment in ALKI II in maintaining the security stability of the IKN. The research method used is qualitative with an exploratory approach, collecting data from various sources related to maritime security and defense strategy. The results of the study indicate that the current Koarmada II force deployment is not optimal in maintaining security stability in ALKI II. The main challenges faced include the lack of military infrastructure in the region and the absence of an integrated defense strategy. This study recommends increasing military capacity, strengthening infrastructure, and planning a more comprehensive defense strategy to maintain security stability in the IKN. The implementation of a strong force deployment in ALKI II is very important in supporting national security and sustainable development in the IKN.*

Keywords: *Deployment, Archipelagic Sea Lanes, Capital City*

Abstrak. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar, menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas keamanan, terutama dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. ALKI II, jalur laut strategis yang menghubungkan IKN dengan wilayah lainnya, rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, baik tradisional maupun non-tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi gelar kekuatan Koarmada II di ALKI II dalam menjaga stabilitas keamanan IKN. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif, mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait keamanan maritim dan strategi pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gelar kekuatan Koarmada II saat ini belum optimal dalam menjaga stabilitas keamanan di ALKI II. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya infrastruktur militer di wilayah tersebut dan belum adanya strategi pertahanan yang terintegrasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas militer, penguatan infrastruktur, dan perencanaan strategi pertahanan yang lebih komprehensif guna menjaga stabilitas keamanan di IKN. Implementasi gelar kekuatan yang kuat di ALKI II sangat penting dalam mendukung keamanan nasional dan keberlanjutan pembangunan di IKN.

Kata kunci: Gelar, ALKI II, Ibukota Nusantara.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan strategis yang kompleks dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya. Salah satu tantangan utama adalah pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), terutama ALKI II yang membentang dari Laut Sulawesi, Selat Makassar, hingga Laut Flores. ALKI II merupakan jalur penting bagi lalu lintas maritim internasional dan aktivitas ekonomi domestik. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur semakin meningkatkan urgensi pengamanan di

wilayah ini, karena ALKI II menjadi jalur utama yang menghubungkan IKN dengan wilayah lain di Indonesia dan dunia internasional. Posisi strategis ALKI II juga membuatnya rentan terhadap berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer. Ancaman-ancaman ini mencakup pelanggaran wilayah, penyelundupan, penangkapan ikan ilegal (IUUF), hingga terorisme. Selain itu, Selat Makassar sebagai bagian dari ALKI II berbatasan langsung dengan Malaysia, meningkatkan risiko konflik perbatasan dan potensi ancaman terhadap IKN. Dengan meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, kehadiran negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok dengan gelar kekuatan militer mereka juga menjadi faktor penting yang perlu diwaspadai. Penggelaran kekuatan Koarmada II di ALKI II menjadi krusial dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah ini. Selain untuk mengamankan jalur komunikasi laut (Sea Lines of Communication/SLOC), penggelaran ini bertujuan mencegah dan menanggulangi ancaman baik dari aktor negara maupun non-negara. Pendekatan strategis yang mengadaptasi prinsip-prinsip pertahanan klasik, seperti yang dijelaskan oleh Sun Tzu, bisa diterapkan dalam konteks pengamanan Selat Makassar dengan memanfaatkan posisi geografisnya yang luas untuk memperkuat daya tangkal terhadap ancaman eksternal. Peningkatan penggelaran kekuatan TNI AL di ALKI II, khususnya oleh Koarmada II, merupakan bagian dari implementasi konsep *smart defense* yang diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan, baik tradisional maupun non-tradisional. Melalui strategi pertahanan yang terintegrasi, termasuk pembangunan infrastruktur pertahanan dan teknologi canggih, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan stabilitas keamanan nasional, khususnya di wilayah strategis seperti ALKI II dan IKN.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai penelitian ilmiah, diperlukan literatur akademis yang relevan dengan pertanyaan penelitian untuk membentuk kerangka teoritis dalam memahami fenomena yang diteliti. Teori berfungsi sebagai landasan prediksi dalam merumuskan hipotesis. Dengan menetapkan landasan teori, peneliti dapat memprediksi hasil penelitian. Dalam konteks ini, penelitian mengacu pada teori-teori yang relevan seperti Teori Strategi Perang, Teori Keamanan Maritim, Teori Penangkalan, dan Teori Pembangunan Kekuatan Militer.

Strategi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah ilmu dan seni dalam menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan dalam perang dan damai. Dalam militer, strategi adalah rencana cermat untuk mencapai sasaran khusus. Carl von Clausewitz dalam "On War" menyatakan bahwa perang adalah tindakan kekuatan militer untuk memaksa musuh melakukan kehendak kita, sedangkan Sun Tzu dalam "The Art of War" menyatakan bahwa hakikat perang adalah masalah penting yang melibatkan hidup dan mati suatu negara. Strategi yang tepat dalam peperangan mencakup penguasaan informasi, imbalan daya tempur, dan dukungan politik dari negara. Arthur F. Lykke Jr. mengembangkan konsep strategi militer dalam tiga komponen: tujuan (ends), cara (ways), dan sumber daya (means). Ketiga elemen ini harus seimbang untuk mencapai kemenangan dalam pertempuran.

Keamanan maritim merupakan ekspansi dari konsep keamanan nasional, terutama setelah Perang Dingin. Menurut Winarno (2008), keamanan maritim melibatkan interaksi antara aktor negara dan non-negara, menjadikan ancaman tidak hanya bersifat konvensional tetapi juga non-tradisional. Christian Buerger (2014) menjelaskan konsep keamanan maritim



melalui kerangka konvergen yang mencakup keamanan nasional, lingkungan maritim, pembangunan ekonomi, dan keamanan manusia. Dalam konteks nasional, keamanan maritim berhubungan dengan perang di laut, proyeksi kekuatan angkatan laut, dan perlindungan terhadap sumber daya laut. Konsep ini mendukung peran TNI AL dalam menjaga stabilitas keamanan nasional melalui penggelaran kekuatan maritim di ALKI II untuk melindungi wilayah IKN.

Teori penangkalan bertujuan mencegah musuh melakukan tindakan agresif melalui ancaman pembalasan yang kredibel. Elemen utama dalam penangkalan adalah kapabilitas militer yang memadai dan kredibilitas ancaman tersebut. Agar penangkalan efektif, komunikasi juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa ancaman dipahami oleh lawan. Kapabilitas militer yang kuat harus didukung dengan komunikasi strategis untuk mengelola persepsi lawan, sehingga mereka menyadari risiko yang dihadapi. Dengan adanya penangkalan yang jelas dan tegas, negara dapat mencegah ancaman baik dari sisi militer maupun non-militer, terutama dalam konteks pengamanan ALKI II dan stabilitas IKN.

Menurut Henry C. Bartlett (1990), pembangunan kekuatan militer didasarkan pada empat pilar utama: kesiapan, ketahanan, modernisasi, dan struktur kekuatan. Kesiapan mencakup kemampuan personel, pelatihan, dan pemeliharaan alutsista. Ketahanan berkaitan dengan dukungan logistik yang memungkinkan operasi militer bertahan dalam jangka panjang. Modernisasi fokus pada peningkatan teknologi dan kapabilitas alutsista, sedangkan struktur kekuatan mencakup jumlah dan komposisi satuan militer. Teori ini memberikan panduan bagi pembangunan kekuatan Koarmada II di ALKI II, yang bertujuan untuk memastikan stabilitas keamanan di IKN dan perairan sekitarnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial dan kemanusiaan yang diteliti. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data dari partisipan secara spesifik, analisis data induktif, dan interpretasi terhadap makna data. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam melalui pendekatan berpikir induktif, di mana pengamatan dilakukan terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan. Sukmadinata (2015) juga menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, serta persepsi individu atau kelompok terkait subjek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti secara langsung terlibat dalam situasi yang diteliti untuk mengenali fenomena secara lebih mendalam. Desain penelitian yang digunakan adalah desain eksploratif, sesuai dengan pandangan Bungin (2013) yang menyebutkan bahwa desain eksploratif bertujuan untuk mengeksplorasi masalah yang belum pernah diteliti sebelumnya. Desain ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menemukan masalah yang belum teridentifikasi secara jelas, sehingga memungkinkan penemuan informasi baru terkait topik penelitian. Carmel (Howitt, 2010) menjelaskan bahwa pendekatan eksploratif dalam penelitian kualitatif berusaha menghasilkan pengetahuan baru di bidang yang masih kurang dipahami. Dengan desain ini, peneliti mampu mengeksplorasi lebih dalam mengenai implementasi gelar kekuatan Koarmada II di ALKI II dan bagaimana hal ini berdampak pada stabilitas keamanan Ibu Kota Negara (IKN). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Wawancara dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana subjek penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian, seperti unsur-unsur yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan kebijakan terkait keamanan di ALKI II. Observasi dilakukan secara tidak terstruktur untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan tanpa batasan panduan yang ketat, sehingga peneliti dapat menyelami lebih dalam situasi objek yang diamati. Studi kepustakaan melengkapi metode pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis yang relevan untuk mendukung analisis penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti menerapkan teknik analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman (2014). Analisis ini terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dikategorikan, difokuskan, dan disederhanakan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas. Data kemudian disajikan dalam bentuk yang memudahkan peneliti untuk memahami konteksnya, sehingga kesimpulan dapat ditarik secara tepat dan akurat. Melalui model interaktif ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan sebab-akibat, dan akhirnya menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gelar kekuatan Koarmada II di ALKI II sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan strategis Indonesia, terutama di Selat Makassar. Keberadaan jalur laut ini memiliki kepentingan internasional, dan posisi Koarmada II yang bertanggung jawab terhadap pengamanan ALKI II merupakan faktor kunci dalam upaya mempertahankan kedaulatan maritim. Gelar operasi yang dilakukan oleh Koarmada II sudah menunjukkan keberhasilan dalam menekan ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional seperti pembajakan, penyelundupan, serta penangkapan ikan ilegal (IUUF). Dalam rangka menjaga stabilitas maritim di ALKI II, Koarmada II telah melaksanakan berbagai operasi rutin, seperti Operasi Pengamanan ALKI II dan Operasi Kamla. Patroli maritim yang dilakukan Koarmada II terbukti efektif dalam menghadapi ancaman keamanan maritim di wilayah ini, dengan dukungan kekuatan kapal perang (KRI), pesawat patroli maritim (Pesud), serta sistem pengawasan radar.

Namun, tantangan masih ada, terutama terkait keterbatasan jumlah kapal patroli dan keterbatasan teknologi yang tersedia. Kendala lain yang dihadapi Koarmada II dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di ALKI II adalah masalah modernisasi alutsista. Sebagian besar KRI yang digunakan Koarmada II membutuhkan peningkatan teknologi dan pemeliharaan yang lebih baik. Beberapa kapal perang masih menggunakan teknologi lama yang tidak memadai untuk menghadapi ancaman modern, seperti serangan udara, kapal selam, atau ancaman elektronik. Untuk itu, penambahan unsur-unsur alutsista seperti pesawat patroli maritim, kapal selam, serta sistem pemantauan berbasis satelit menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas pengawasan di ALKI II. Koarmada II juga perlu memperluas sinergi antarinstansi dengan lembaga lain, seperti Bakamla, Polair, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), guna menciptakan sistem keamanan yang lebih terpadu. Koarmada II juga terlibat dalam kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga seperti Filipina dan Malaysia untuk mengamankan wilayah perbatasan. Operasi patroli gabungan ini berperan penting dalam mengurangi ancaman lintas negara seperti penyelundupan narkoba dan perompakan. Keberhasilan operasi-operasi ini menunjukkan bahwa kerjasama regional merupakan elemen kunci dalam menjaga keamanan maritim di kawasan ALKI II. Selain



ancaman tradisional, ancaman non-tradisional seperti pencemaran lingkungan dan spill-over konflik regional menjadi tantangan baru bagi Koarmada II. Insiden tumpahan minyak yang terjadi di Selat Makassar pada tahun 2023 menggarisbawahi perlunya pengawasan ketat dan respons cepat dalam menangani ancaman lingkungan yang berdampak pada ekosistem laut serta ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam hal strategi pembangunan kekuatan militer, Koarmada II perlu fokus pada peningkatan kapasitas infrastruktur militer di sekitar IKN. Pembangunan infrastruktur seperti pangkalan laut, fasilitas perbaikan (Fasharkan), serta fasilitas logistik sangat diperlukan untuk mendukung operasi jangka panjang di kawasan strategis ini. Fasilitas ini harus dapat mendukung kegiatan operasional kapal perang dan pesawat patroli yang tergelar di ALKI II. Untuk lebih mendukung keamanan di ALKI II, diperlukan pembangunan sistem pengawasan terintegrasi yang mencakup radar pantai, sistem deteksi sonar, dan penggunaan pesawat tanpa awak (drone) untuk meningkatkan jangkauan pengawasan maritim. Pengembangan sistem pengawasan ini akan memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM), pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi personel Koarmada II menjadi penting untuk menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks. Penekanan pada peningkatan keterampilan penggunaan teknologi canggih dan kemampuan tempur menjadi prioritas utama dalam pembangunan kekuatan personel. Pembangunan kekuatan militer Koarmada II juga perlu mempertimbangkan konsep pertahanan cerdas (Smart Defense) yang mengintegrasikan teknologi dengan kekuatan militer tradisional. Dalam konteks IKN, penggunaan teknologi pengawasan canggih dan diplomasi pertahanan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penangkalan terhadap berbagai ancaman yang datang dari laut. Strategi pembangunan kekuatan militer yang diterapkan Koarmada II harus mencakup aspek kesiapan operasional, ketahanan logistik, modernisasi alutsista, dan restrukturisasi kekuatan personel. Kombinasi dari keempat pilar ini akan memastikan bahwa Koarmada II dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan di ALKI II secara optimal. Koarmada II juga harus memperkuat kapabilitas kapal selam dan pesawat patroli maritim guna meningkatkan kemampuan anti-kapal selam dan anti-serangan udara. Dengan adanya peningkatan kapabilitas ini, Koarmada II akan lebih mampu menghadapi berbagai ancaman maritim yang kompleks, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada akhirnya, strategi pembangunan kekuatan militer Koarmada II harus didukung oleh pengembangan infrastruktur logistik yang memadai di wilayah IKN, terutama di Lanal Balikpapan. Dengan dukungan logistik yang kuat, operasi pengamanan di ALKI II akan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya peran Koarmada II dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di ALKI II, terutama dalam mendukung pembangunan IKN. Tantangan yang dihadapi Koarmada II meliputi keterbatasan alutsista, infrastruktur, dan SDM, namun melalui strategi pembangunan kekuatan yang komprehensif, Koarmada II dapat memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional di kawasan strategis ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Koarmada II memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II), terutama dalam konteks pemindahan Ibu Kota



Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Gelar kekuatan Koarmada II yang terdiri dari operasi intelijen maritim, operasi tempur, dan operasi keamanan laut, memiliki tantangan dan perlu penguatan lebih lanjut, terutama dalam modernisasi alutsista dan infrastruktur. Selain itu, peningkatan jumlah dan kualitas sistem pengawasan serta integrasi antar satuan merupakan langkah penting untuk menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional di ALKI II. Dalam menjaga stabilitas IKN, Koarmada II juga perlu mengembangkan strategi pertahanan modern berbasis teknologi dengan konsep Smart Defence yang menggabungkan pertahanan militer dan diplomasi maritim. Koarmada II harus terus memperkuat peran dan kapabilitasnya dalam menjaga stabilitas keamanan maritim, terutama dengan mempertimbangkan pentingnya pengamanan ALKI II yang menjadi jalur vital bagi Indonesia dan IKN yang baru. Pembangunan kekuatan militer berbasis teknologi, modernisasi alutsista, dan peningkatan sinergi antar satuan serta instansi menjadi prioritas utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim. Pemerintah, Kementerian Pertahanan, dan Mabes TNI diharapkan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan maritim nasional demi memastikan keamanan jangka panjang bagi IKN dan wilayah maritim Indonesia.

Pemerintah disarankan untuk mempercepat pembangunan Poros Maritim Dunia melalui peraturan yang mendorong peran TNI AL dalam pengendalian laut nasional di ALKI II, khususnya terkait pengamanan IKN. Kementerian Pertahanan perlu merealisasikan pengadaan satelit militer mandiri untuk mendukung teknologi pertahanan modern dan meningkatkan jaringan komunikasi yang cepat dan aman. Mabes TNI juga perlu mengkaji pembentukan Satuan TNI Terintegrasi (STT) di wilayah perbatasan ALKI II serta membangun sistem pengawasan maritim di pesisirnya guna menciptakan efek penangkalan terhadap ancaman dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ade Prasetya. (2016). *Ekonomi Maritim Indonesia*, Yogyakarta : Diandra Kreatif.
- Andi Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arthur Lykke. (1993). *“Military Strategy: Theory and Application”* Pennsylvania: US Army War College.
- Bermana, S., Prakoso, L. Y., Patmi, S., Al-Mujaddid, T. F., Habibie, S. Y., Susmoro, H., ... & Gunawan, R. (2025). UNDERWATER SURVEILLANCE PERTAHANAN LAUT INDONESIA.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran edisi pertama*. (Jakarta: kencana prenada media group).
- Carl Von Clausewitz. (2007). *On War*, Terj. Michael Howard dan Peter Paret. New York : Oxford University Press.



-
- Creswell J. W. (2016). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Husein Umar. (2013). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhadjir Noeng, (1998), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, S., Supangat, S., Esterina, M., Souhoka, S., Chandra, F., & Hariputra, A. & Arianto, T.(2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Rahman, Chris. (2009). “*Concept of Maritime Security*”. New Zealand: Centre for Strategic Studies.
- Sun Tzu. *The Art of War*, translated by Lionel Giles, Chapter 10: Terrain, Section 4-6.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sigit Purwanto, S. I. P. (2024). Definisi Dan Konsep. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1.
- Snyder, G. H. (1961). **Deterrence and Defense: Toward a Theory of National Security**. Princeton University Press.
- Tjio Tjiang Feng. (2007). “*Seni Perang Sun Tzu dan 36 Strategi*”. Jakarta : Transmedia Pustaka.
- Winarno, Budi. (2008). *Isu-Isu Keamanan Strategis Dalam Kawasan ASEAN*. Jakarta: P2P-LIPI.

2. Jurnal

- Ayu Laksmi Saraswati, dkk “*Strategi Keamanan Maritim Indonesia terhadap Maritime Piracy di Laut Sulu Tahun 2016*” Jurnal Transformasi Global : Universitas Brawijaya Vol.7 No.1 tahun 2020
- Bartlett, Henry C., *Fundamentals of Force Planning*, Vol. 1 (Concept), Chapter-3: Force Planning Approaches (The Force Planning Faculty, Naval War College Press, Newport, RI, 1990), hlm 287 ,*"Four Pillars of Combat Capability,"* dalam Naval War College Review, Vol. 43, No. 1, 1990.
- Fajriyati Inaku, Dwi (2015). "*Analisis Pola Sebaran dan Perkembangan Area upwelling di bagian selatan selat Makassar*". Torani (Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan). (2015): 67.
- KKP Annual Report 2023; Indonesian Fisheries Journal, Vol. 13, No. 3, 2024.
- Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). POWER DYNAMICS IN DECISION MAKING: A QUALITATIVE ANALYSIS. *POWER*, 2(1), 80-86.



Purwanto, S., Hidayatullah, S. S. W., & Tirtoadisuryo, D. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR ENHANCING ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE DIGITAL ERA.

Sartono, B. P., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021), *The Indonesia Government Authoriry in securing Indonesia Archipelago Sea Lanes (ASLs/ALKI)*, International Journal of Education and Social Science Research, Vol. 4, No. 02; Mar-Apr 2021.

3. Media Online

Lemhanas, *Konsepsi dan Tolak Ukur Ketahanan Nasional, Modul III BS. Geostrategi dan Tannas* (Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2008) Hal. 1.

Pokja Lemhannas RI BS. *Geopolitik dan Wasantara. Modul II Konsepsi Wawasan Nusantara.* (Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2012)

Qomarudin (2023), *Pembangunan Postur TNI AL Guna Mendukung Sistem Pertahanan dan Keamanan di Ibu Kota Nusantara*, Kertas Karya Ilmiah Perotarang, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Lemhanas RI.

Rahman, Chris. “*Concept of Maritime Security*” (New Zealand: Centre for Strategic Studies, 2009)

ReCAAP (2023), ISC Annual Report 2023, *Piracy and Armed Robbery Against Ship in Asia.*

Widjajanto, Andi “*Pertahanan Ibu Kota Negara*” (Lemhanas RI, 2023)

4. Peraturan/Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang RI Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)*.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (SPP) Hanneg.